

INTISARI

Pengawasan Pengaturan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di
Kabupaten Magelang dan Kaitannya dengan Asas Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang Baik.

Oleh

Alfina Elok Faiqoh¹, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M²

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui pengawasan Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2012 dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Magelang, serta mengkajinya menggunakan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penulis akan menggabungkan antara hukum normatif dengan fakta-fakta yang ada di lapangan menggunakan teknik wawancara, penyebaran kuesioner dan pengamatan. Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam memproses data meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dikenakan pada pihak penambang namun justru dikenakan kepada para crew angkutan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2012. Selain itu, pajak ini seharusnya dipungut berdasarkan sistem *self assessment*, namun pada prakteknya justru menggunakan sistem *official assessment*. Pihak DPPKAD berpendapat bahwa hal ini dilakukan lantaran ketidakmungkinan apabila pajak dipungut kepada pihak penambang serta menggunakan sistem *self assessment*.

Kata kunci : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pengawasan, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik.

¹ Mahasiswa S1 Konsentrasi Hukum Pajak, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Konsentrasi Hukum Pajak Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

ABSTRACT

The Supervision of Non Metal Mineral Tax Collection in Magelang Regency and in Relation with The Principles of Good Legislation.

By

Alfina Elok Faiqoh³, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M⁴

This legal research aims to find out the supervision of Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2012 on non metal mineral tax collection in Magelang Regency and examine it using the principles of good legislation.

In this legal research, the author uses method by combining normative research and empirical research method. The author combines the normative law, facts based on interview, and questionnaire deployment. The research method is used in processing data of the research by the author such from the literatures and field research.

Non metal mineral tax that should be collected from the miners, however just collected from the shipping crew of mineral non metal and rocklike based on Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2012. Besides, this tax should be collected based on self assessment system, but in fact using official assessment system. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) opines that self assessment system is impossible used to collect this tax from the miners.

Keywords: Mineral Non Metal and Rocklike Tax, Supervision, The principles of establishment of Good Regulation.

³ Undergraduate Student Tax of Law Departemen, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

⁴ Tax Law Lecturer of Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.